

RINGKASAN

ELI ERLINA. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas Permintaan Penegak Hukum sebagaimana dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Dugaan Pelanggaran oleh Notaris, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum, anggota : Dr. Kadar Pamuji, S.H.,M.H.

Majelis Kehormatan Notaris melakukan penolakan permohonan penyidik atas permintaan persetujuan dalam proses peradilan, adanya penolakan kasus maka dilakukan pengujian Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas permintaan penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris, dan untuk menganalisis alasan penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap permohonan pemeriksaan pada Notaris oleh penyidik kepolisian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam memberikan persetujuan permintaan penyidik untuk menghadirkan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara yang ditanganinya, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dapat menolak dan atau mengabulkan permintaan, hal ini disesuaikan dengan kondisi obyektif pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan terhadap notaris. Alasan Penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap permintaan penyidik untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi atau tersangka, apabila dari hasil sidang pemeriksaan terhadap objek dalam Akta sebelum dibuat Akta telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur menurut undang-undang.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Penegak Hukum, Pelanggaran Notaris.

SUMMARY

ELI ERLINA. Magister of Notary, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University. The Role of the Honorary Assembly of Regional Notaries at the Request of Law Enforcement as in article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary against Alleged Violations by Notaries, Advisory Commission, Chairperson: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum, Member : Dr. Kadar Pamuji, S.H.,M.H.

The Honorary Notary Council rejected the investigator's application for approval in the judicial process, the rejection of the case was carried out by testing Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary at the Constitutional Court. This study aims to analyze the role of the Regional Notary Honorary Assembly at the request of law enforcement as in Porigin 66 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary against alleged violations by Notaries, and to analyze the reasons for the refusal of the Regional Notary Honorary Assembly to the application for examination of notaries by police investigators. The research used is normative legal research with a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study show that: The role of the Regional Notary Honorary Council in approving the investigator's request to present as a witness or suspect in the case he handles, the Regional Notary Honorary Council can refuse and or grant the request, this is adjusted to objective conditions at the time of the examination of the notary. The reason for the refusal of the Regional Notary Honorary Council to the request of the investigator to present the Notary as a witness or suspect, if from the results of the hearing the examination of the object in the Deed before the Deed was made has been carried out in accordance with the standard operating procedures according to the law.

Keywords: *The Regional Notary Honorary Council, Law Enforcement, Notarial Offences.*